

**BAB IV**  
**PEMBANGUNAN HUKUM, KETENTRAMAN**  
**KETERTIBAN UMUM DAN KESATUAN BANGSA**

**A. UMUM**

Kondisi penegakan hukum di wilayah Propinsi DKI Jakarta walaupun mulai mendapat perhatian semua pihak, tetapi belum mencapai kemajuan berarti. Disamping belum banyak produk hukum seperti Perda yang dihasilkan di era reformasi, terhadap produk-produk hukum yang ada juga belum dilakukan evaluasi apakah masih relevan dan sejalan dengan semangat reformasi serta aspirasi dan kebutuhan masyarakat Jakarta yang majemuk dan dinamis. Disamping itu, penegakan supremasi hukum berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia secara universal, masih berjalan lambat.

Disisi lain kesadaran hukum masyarakat dirasakan masih rendah, yang ditandai dengan masih banyaknya anggota masyarakat Jakarta yang melakukan pelanggaran hukum dan peraturan daerah. Keadaan ini diperburuk lagi oleh kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang masih rendah, sehingga penyelesaian masalah dengan main hakim sendiri lebih dipilih daripada penyelesaian melalui proses hukum yang berlaku. Hal ini disebabkan antara lain oleh kurangnya rasa aman dan ketentraman masyarakat, serta masih belum tersosialisasinya peraturan perundang-undangan daerah baik sebelum maupun sesudah ditetapkan, sehingga seringkali menimbulkan kesalahpahaman antara masyarakat dengan penyelenggara pemerintahan daerah termasuk aparat penegak hukum.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program pembangunan Propinsi DKI Jakarta yang berkesinambungan, diperlukan suasana dan iklim yang kondusif yang memungkinkan semua elemen masyarakat dapat terlibat dan berperanserta secara baik. Iklim kondusif hanya dapat dicapai bila suasana lingkungan terbebas dari konflik sosial dan model demonstrasi yang cenderung

anarkis dan tak terkendali. Untuk itu, penegakan ketentraman dan ketertiban yang konkrit dan konsisten menjadi faktor penting pula dalam mendukung iklim kondusif tadi.

Pulihnya ketentraman dan ketertiban umum dapat meningkatkan kredibilitas dan kewibawaan aparat penegak hukum. Polisi bersama petugas tramtib sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban sekaligus pengayom masyarakat harus mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya secara profesional. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, diperlukan dukungan sarana dan prasarana serta teknologi yang memadai. Disamping itu sikap mental dan perilaku aparat yang adil, profesional dan penuh pengabdian menjadi faktor bagi keberhasilan penegakan hukum, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pembangunan hukum, ketentraman ketertiban umum dan kesatuan bangsa dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat sadar hukum, taat hukum, tertib dan menghayati hak serta kewajibannya sebagai anggota masyarakat dan bangsa, guna menumbuhkembangkan disiplin dan tanggung jawab sosial bagi setiap warga kota Jakarta sekaligus sebagai penduduk negara kesatuan RI. Agar proses penyadaran hukum masyarakat berjalan efektif, diperlukan dukungan baik kemampuan, keteladanan, dan kewibawaan aparat penegak hukum, maupun tersedianya sarana dan prasarana pelayanan hukum yang memadai.

## **B. ARAH KEBIJAKAN**

Arah kebijakan dari fungsi hukum, ketentraman ketertiban umum dan kesatuan bangsa adalah:

### **1. Hukum**

Menata kembali seluruh peraturan perundang-undangan daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan dapat mendukung perkembangan kebutuhan masyarakat pada era otonomi daerah, menegakkan supremasi hukum, meningkatkan kepastian hukum pada kegiatan perekonomian, serta

mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat Jakarta termasuk aparatur daerah.

## **2. Ketentraman, Ketertiban dan Penanggulangan Bencana**

Menciptakan kondisi kota Jakarta yang tentram, tertib dan teratur, serta menciptakan stabilitas daerah yang mantap dan dinamis sehingga dapat mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, aktivitas masyarakat, mampu mengamankan hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan, termasuk kemampuan dalam mengantisipasi penanggulangan bencana.

## **3. Kesatuan Bangsa**

Menciptakan suasana kondusif yang mendukung proses penguatan kembali persatuan dan kesatuan bangsa serta mendorong proses peningkatan pemahaman mengenai hak-hak azasi manusia dan demokrasi.

# **C. PROGRAM - PROGRAM PEMBANGUNAN**

## **1. Hukum**

### **1.1. Program Pengembangan Peraturan Perundang-Undangan Daerah**

Program ini bertujuan untuk mendukung upaya-upaya dalam rangka mewujudkan supremasi hukum terutama melalui penataan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan daerah.

Sasaran program ini adalah tersedianya peraturan perundang-undangan daerah sebagai infrastruktur sosial dan ekonomi yang efektif, terwujudnya harmonisasi peraturan perundang-undangan daerah yang sesuai dengan aspirasi dan tuntutan masyarakat Jakarta dan kebutuhan pembangunan daerah, serta terhindarinya peraturan perundangan yang tumpang tindih.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah: (1) memperkuat wadah dan kelembagaan bagi proses pembentukan peraturan perundang-undangan daerah yang mampu menjawab tuntutan dan aspirasi masyarakat Jakarta, (2) menyusun peraturan perundang-undangan daerah yang mendukung

sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif serta birokrasi yang profesional, bersih, responsif, dan berkeadilan, (3) menyempurnakan peraturan perundang-undangan daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat, (4) menyelenggarakan penelitian dan pengkajian mengenai substansi hukum yang belum disusun peraturan perundang-undangannya, (5) melakukan forum kajian dengan masyarakat dan para pakar mengenai produk hukum yang di-Perda-kan, (6) meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam pengembangan dan penelitian hukum dengan melibatkan kalangan akademis, lembaga pengkajian hukum, organisasi profesi hukum dan lembaga swadaya masyarakat, (7) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

## 1.2. Program Peningkatan Kesadaran Hukum

Program ini bertujuan untuk mendukung upaya pemerintah daerah dalam menyebarkan produk hukum sehingga pemahaman masyarakat akan hukum dan peraturan perundang-undangan daerah semakin meningkat.

Sasaran program ini adalah meningkatnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat dan juga aparat Jakarta terhadap seluruh peraturan perundang-undangan daerah, dan meningkatnya rasa memiliki masyarakat terhadap produk hukum dan peraturan perundang-undangan daerah, serta berkurangnya pelanggaran terhadap hukum dan peraturan.

Kegiatan yang dilakukan adalah: (1) melakukan penyadaran hukum kepada masyarakat secara luas dan intensif, (2) melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan daerah dengan pemanfaatan multimedia secara efektif, dan (3) melakukan penelitian dan pengkajian hukum untuk penyesuaian kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

## 1.3. Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum

Program ini bertujuan untuk memulihkan kembali kepercayaan masyarakat kepada peran dan citra lembaga peradilan dan lembaga

penegak hukum lainnya sebagai upaya mewujudkan supremasi hukum dengan didukung oleh aparat penegak hukum yang profesional, berintegritas dan bermoral tinggi.

Sasaran program ini adalah tersusunnya mekanisme yang lebih baik dalam rangka pemberian bantuan dan pelayanan hukum kepada masyarakat dengan harapan semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga maupun aparat penegak hukum. Sasaran lain program ini adalah meningkatkan penegakan supremasi hukum serta menurunkan jumlah tindak kekerasan dan angka kriminalitas.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah: (1) meningkatkan sarana dan prasarana yang diperlukan lembaga dan aparat penegak hukum, (2) meningkatkan penggunaan media komunikasi dalam rangka pencapaian sasaran penegakan supremasi hukum di berbagai lapisan masyarakat Jakarta, (3) meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat, (4) mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum, dan (5) meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum.

## **2. Ketentraman, Ketertiban dan Penanggulangan Bencana**

### **2.1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban**

Tujuan program ini meningkatkan penegakan ketentraman dan ketertiban masyarakat sehingga seluruh warga masyarakat terlepas dari gangguan keamanan, lebih tertib dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sasaran program ini adalah terwujudnya ketentraman, ketertiban dan kenyamanan masyarakat dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari, terlepas dari ancaman kejahatan dan tindak kriminalitas.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah: (1) melakukan peningkatan kemampuan dan profesionalisme aparat keamanan dan petugas tramtib, (2) menata sikap mental dan perilaku aparat dan petugas tramtib untuk mendukung peran, tugas dan fungsinya sebagai komponen utama sistem ketentraman dan ketertiban umum, (3) meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar instansi dalam upaya penegakan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang lebih efektif dan terpadu, (4) meningkatkan penanganan penertiban hunian ilegal, pembinaan pengemudi angkutan umum, pembinaan anak jalanan, penataan PKL, serta pengawasan terhadap daerah rawan tawuran dan rawan kejahatan/kriminalitas, dan (5) meningkatkan efektifitas penanganan masalah narkoba dengan sasaran pengedar dan penggunanya.

## 2.2. Program Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Tramtibmas dan Penanggulangan Bencana

Tujuan program ini adalah meningkatkan kemampuan pengamanan wilayah hukum dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta penanggulangan bencana dengan mendayagunakan secara optimal peranserta masyarakat secara terpadu dengan komponen utama penegakan ketentraman dan ketertiban.

Sasaran program ini adalah terwujudnya keterkaitan, kerjasama dan saling mendukung dalam penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta penanggulangan bencana antara petugas dan masyarakat sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah: (1) menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan daerah yang mengatur peranan petugas keamanan dan peranserta masyarakat dalam menangani dan menghadapi gangguan ketentraman dan ketertiban umum, (2) mengembangkan kemampuan dukungan sarana dan prasarana keamanan lingkungan, dan (3) meningkatkan pembinaan masyarakat untuk mewujudkan peranserta aktif dalam penegakan ketentraman, ketertiban umum dan penanggulangan bencana.

### 2.3. Program Peningkatan Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran

Tujuan program ini adalah untuk menciptakan ketentraman masyarakat terhadap timbulnya bencana alam, banjir, kebakaran, atau sejenisnya. Kecemasan dan kekhawatiran masyarakat muncul karena anggapan bahwa kualitas dan kuantitas para petugas serta sarana dan prasarana penanggulangan bencana dan kebakaran belum memadai.

Sasaran program ini adalah terpenuhinya jumlah dan kualitas petugas serta peralatan yang memadai untuk penanggulangan bencana alam dan kebakaran di wilayah DKI Jakarta.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah: (1) meningkatkan profesional petugas dalam penanggulangan bencana dan kebakaran, (2) mewujudkan terpenuhinya standar minimal peralatan yang dimiliki oleh dinas penanggulangan bencana, (3) membentuk sistem dan pusat penanggulangan bencana (*crisis centre*), (4) membuat dan menempatkan pos-pos bencana dan kebakaran pada titik rawan bencana alam dan kebakaran di seluruh wilayah DKI Jakarta, (5) menyediakan perahu-perahu karet di setiap kelurahan yang rawan banjir, (6) menambah hidran-hidran pemadam kebakaran pada daerah-daerah padat dan rawan kebakaran, serta di pusat-pusat perdagangan, (7) meningkatkan armada pemadam kebakaran dan (8) melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

### 2.4. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Tramtib dan Penanggulangan Bencana

Program ini bertujuan untuk memenuhi standar minimal dari sarana dan prasarana tramtib dan penanggulangan bencana sesuai dengan perkembangan dan kemajuan teknologi. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat lebih tenteram dan nyaman karena aparat kamtibmas diyakini mampu menangkal setiap gangguan dan bencana yang muncul.

Sasaran program ini adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan secara memadai untuk mendukung pelaksanaan

penegakan kamtibmas dan penanggulangan bencana yang dapat menjamin rasa aman, tentram dan tertib masyarakat.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah: (1) memperbaharui peralatan tramtib yang sudah tertinggal teknologinya, (2) meningkatkan peralatan tramtib agar lebih proporsional terhadap luas wilayah, jumlah penduduk serta frekuensi gangguan tramtib, dan (3) memanfaatkan perkembangan teknologi peralatan tramtib guna mengantisipasi timbulnya gangguan tramtib yang lebih canggih.

### **3. Kesatuan Bangsa**

#### **3.1. Program Pemantapan Integrasi Bangsa dan HAM**

Peran pemerintah daerah dalam kaitan pembinaan masyarakat adalah berusaha semaksimal mungkin agar tetap terbinanya rasa kesatuan dan persatuan bangsa, terciptanya kerukunan dan saling percaya antar warga masyarakat sehingga ketahanan bangsa dapat terus terjaga. Pemerintah daerah diharapkan mampu untuk menanggulangi dan mengatasi gejala disintegrasi dan pecahnya persatuan antar warga masyarakat.

Sasaran program ini adalah berkurangnya potensi perselisihan dan perkelahian yang bersifat partisan dan primordial.

Kegiatan pokok yang dilakukan pada program ini adalah: (1) mengembangkan sistem budaya bermasyarakat yang rukun dan tentram dengan menghilangkan budaya primordial dan partisan, (2) meningkatkan kesadaran adanya saling ketergantungan dan saling membutuhkan satu sama lain, (3) meningkatkan kesadaran terhadap kesetaraan dan keadilan antar anggota masyarakat, (4) memasyarakatkan dan menerapkan prinsip kebersamaan dan anti diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat, dan (5) membentuk aktivitas yang terorganisir sampai dengan tingkat RT/RW.

#### **3.2. Program Hubungan Antar Lembaga Kemasyarakatan**

Hubungan antar lembaga kemasyarakatan di DKI Jakarta dapat merupakan jalinan yang baik dan saling melengkapi dalam rangka memperkuat basis ketahanan wilayah serta media untuk saling berinteraksi sosial.

Tujuan program ini adalah terbentuknya hubungan lembaga kemasyarakatan yang kuat sehingga dapat mencegah timbulnya kesalahpahaman dan salah persepsi terhadap kejadian-kejadian di masyarakat dan terhadap hasil pembangunan. Dengan demikian dapat tercipta kondisi yang kondusif bagi pembangunan ekonomi dan aktivitas masyarakat secara luas.

Sasaran program ini adalah terwujudnya ketentraman dan keamanan masyarakat Propinsi DKI Jakarta yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitasnya serta terjalinnya interaksi sosial antar lembaga kemasyarakatan di Propinsi DKI Jakarta.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah: (1) menginventarisir lembaga kemasyarakatan yang ada, (2) memfasilitasi pertemuan-pertemuan antar pengurus lembaga kemasyarakatan secara periodik, dan (3) mendorong terjalinnya komunikasi dan saling tukar informasi antar lembaga kemasyarakatan.